



LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN OKTOBER 2016

Pendahuluan

Fungsi pokok Komnas HAM yang dikenal rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelasberwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

Pada 1 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah 739 berkas.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	4	20	Kalimantan Barat	-
2	Sumatera Utara	71	21	Kalimantan Selatan	5
3	Bengkulu	6	22	Kalimantan Tengah	9
4	Jambi	8	23	Kalimantan Timur	12

5	Riau	25	24	Kalimantan Barat	6
6	Sumatera Barat	37	25	Gorontalo	-
7	Sumatera Selatan	26	26	Sulawesi Selatan	15
8	Lampung	14	27	Sulawesi Tenggara	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	28	Sulawesi Tengah	8
10	Kepulauan Riau	5	29	Sulawesi Utara	10
11	Banten	23	30	Sulawesi Selatan Barat	3
12	Jawa Barat	68	31	Maluku	29
13	DKI Jakarta	182	32	Maluku Utara	-
14	Jawa Tengah	29	33	Papua	15
15	Jawa Timur	55	34	Papua Barat	1
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	10	35	Tanpa Alamat	28
17	Bali	12			
18	Nusa Tenggara Barat	14			
19	Nusa Tenggara Timur	7			

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	399
2	Subkomisi mediasi	95
3	Tim 65	16
4	Tim KZ	0
5	File	229
Jumlah		739

3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	373
2	Tembusan	362
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan Ke KH	4
Jumlah		739

4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	60
2	Pos	630
3	Fax	17
4	Email	24
5	Audiensi	6
6	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	2
Jumlah		739

5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	20
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	9
4	Hak memperoleh keadilan	264
5	Hak atas kebebasan pribadi	16
6	Hak atas rasa aman	60
7	Hak atas kesejahteraan	301
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	10

9	Hak perempuan	4
10	Hak anak	4
1	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	2
12	Non HAM	49
Jumlah		739

5.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	9
Lingkungan hidup	11
Jumlah	20
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
Jumlah	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	6
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	2
Jumlah	8
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	203
Kesewenang-wenangan proses hukum di Kejaksaan	10
Kesewenang-wenangan proses hukum di pengadilan	47
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	3
Jumlah	263
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	0

Kebebasan beragama dan berkeyakinan	10
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat	0
Berkumpul, berapat, dan berserikat	2
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	2
Status kewarganegaraan	1
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	1
Jumlah	16
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	9
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	18
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	6
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	1
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	15
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	11
Jumlah	60
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	24
Hak atas kepemilikan tanah	119
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	63
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	27
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	47

Hak atas kesehatan	17
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	4
Jumlah	301
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	2
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	0
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	8
Jumlah	10
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	2
Hak atas kesetaraan dengan suami	2
Jumlah	4
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	1
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	0
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	3
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	4
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	1
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	1

Jumlah	2
Tidak ada turunan hak	Jumlah berkas
Non Ham	51

6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	365
2	Individu - Anak	12
3	Individu - Perempuan	15
4	Individu - Buruh migran	3
5	Individu - Pekerja / profesi	22
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	0
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	0
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	8
12	Individu - Lansia	3
13	Individu - Fakir miskin	0
14	Kelompok - Masyarakat	182
15	Kelompok - Anak-anak	1
16	Kelompok - Perempuan	0
17	Kelompok - Buruh migran	0
18	Kelompok - Pekerja / profesi	38
19	Kelompok - Masyarakat adat	13
20	Kelompok - Ras dan etnis	1
21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	6
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0

23	Kelompok - LGBT	2
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	7
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	4
28	Warga negara asing	3
29	Korporasi	6
30	Lembaga Pendidikan	5
31	Polri	
32	Kelompok Narapidana	1
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	41

7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	68
2	Pemerintah daerah	103
3	Lembaga legislatif	0
4	Lembaga negara (Non kementerian)	8
5	Lembaga peradilan	46
6	Kepolisian	230
7	TNI	15
8	Kejaksaan	24
9	Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan	5
10	Pemerintah negara lain	2
11	Korporasi	107
12	BUMN / BUMD	31
13	Lembaga pelayanan kesehatan	8
14	Lembaga pendidikan	11
15	Organisasi	5
16	Individu - Orang seorang	17

17	Individu - Pekerja / profesi	5
18	Kelompok - Masyarakat	5
19	Kelompok - Masyarakat adat	3
20	Individu – Perempuan	0
21	Kelompok - Pekerja	0
23	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	46

8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999¹, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999² dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Oktober 2016 sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
39	111	19	169

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.

¹Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

²Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Jakarta, 31 Oktober 2016
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM
KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim